

KAPITALISME PLATFORM DAN Rivai Mana
PENOPTIKON DIGITAL: ETNOGRAFI ATAS Universitas Pejuang Republik
PENGALAMAN PENGEMUDI PEREMPUAN Indonesia
RIDE-HAILING DI MAKASSAR rivaimana65@gmail.com

Abstract

This study is grounded in the everyday lives of women drivers working for Gojek and Grab in Makassar, Indonesia, and seeks to understand how platform capitalism is lived, felt, and negotiated in daily work practices. Focusing on algorithmic management and partnership status, the study examines how digital power relations shape labor subjectivities, affective experiences, and gendered vulnerabilities within the urban digital economy, particularly amid persistent narratives of work flexibility. Adopting a post-structuralist feminist ethnographic approach, the research draws on in-depth unstructured interviews with six women drivers alongside reflexive observation of their daily work rhythms across the city. This ethnographic lens enables close attention to stories, emotions, and everyday tactics that are often overlooked in macro-level policy or political economy analyses. The findings show that algorithms operate as a digital panopticon, governing work through rating systems, task allocation, and opaque automated sanctions, producing a continuous sense of being monitored. Partnership status is initially interpreted by drivers as a promise of autonomy, yet in practice it normalizes the transfer of economic and social risks onto individuals. For women, algorithmic control is layered with emotional labor demands, customer rating biases, and heightened risks in public space. Work flexibility is experienced as illusory, as decisions made for family care or personal safety frequently result in reduced access to work. Nevertheless, women drivers develop micro-resistances through informal solidarity, algorithmic literacy, and ongoing negotiations of time and space. The study underscores that platform labor is not gender-neutral and calls for labor policy interventions grounded in women's lived experiences.

Keywords: Platform Capitalism, Algorithmic Management, Women Drivers, Feminist Ethnography, Gendered Labor

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari keseharian perempuan pengemudi Gojek dan Grab di Kota Makassar, dengan tujuan memahami bagaimana kapitalisme platform dialami, dirasakan, dan dinegosiasikan dalam praktik kerja harian. Melalui fokus pada manajemen algoritmik dan status kemitraan, studi ini menelusuri cara relasi kuasa digital membentuk subjektivitas kerja, pengalaman afektif, dan kerentanan berbasis gender, khususnya di tengah narasi fleksibilitas yang terus direproduksi oleh platform. Menggunakan pendekatan etnografi feminis pasca-strukturalisme, penelitian ini dibangun dari wawancara mendalam tidak terstruktur dengan

enam pengemudi perempuan serta observasi reflektif terhadap ritme kerja mereka di ruang kota. Pendekatan etnografis memungkinkan pembacaan atas cerita, emosi, dan taktik keseharian yang sering terlewat dalam analisis kebijakan atau ekonomi politik makro. Temuan menunjukkan bahwa algoritma hadir sebagai panoptikon digital yang bekerja melalui rating, distribusi pesanan, dan sanksi otomatis yang tidak transparan, menciptakan rasa diawasi secara terus-menerus. Status kemitraan dimaknai para pengemudi sebagai janji otonomi, tetapi dalam praktik justru menormalisasi pemindahan risiko ekonomi dan sosial kepada individu. Bagi perempuan, kontrol algoritmik berkelindan dengan tuntutan kerja emosional, bias penilaian pelanggan, dan risiko keamanan ruang publik. Fleksibilitas kerja dialami sebagai fleksibilitas semu, karena keputusan demi keluarga dan keselamatan sering berujung pada penurunan akses kerja. Meski demikian, perempuan membangun resistensi mikro melalui solidaritas informal, literasi algoritmik, dan negosiasi ruang-waktu kerja. Studi ini menegaskan bahwa kerja platform bersifat tidak netral gender dan memerlukan intervensi kebijakan yang berangkat dari pengalaman hidup perempuan.

Kata Kunci: Kapitalisme Platform, Manajemen Algoritmik, Pengemudi Perempuan, Etnografi Feminis, Kerja Berbasis Gender

Pendahuluan

Transformasi ekonomi digital dalam satu dekade terakhir telah mengubah secara mendasar cara kerja diproduksi, diorganisasi, dan dialami, khususnya di wilayah perkotaan Indonesia. Ekspansi ekonomi berbasis platform pada sektor transportasi daring, melalui perusahaan seperti Gojek dan Grab, menjadi salah satu manifestasi paling nyata dari perubahan tersebut. Fenomena ini seringkali disebut sebagai wujud dari praktik kapitalisme platform. Di Kota Makassar, kehadiran kedua platform ini tidak hanya mengubah pola mobilitas urban, tetapi juga membuka ruang kerja baru bagi ribuan pengemudi yang bergantung pada aplikasi sebagai sumber penghidupan utama. Platform digital dalam konteks ini tidak lagi berfungsi semata sebagai perantara teknologi, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi yang mengatur distribusi kerja, pendapatan, dan risiko melalui sistem aplikasi dan algoritma (Langley & Leyshon, 2017; Brenner et al., 2010). Dalam wacana kebijakan dan publik Indonesia, kerja platform kerap dipromosikan sebagai solusi atas keterbatasan lapangan kerja formal sekaligus simbol inovasi dan modernitas ekonomi (Budiman, 2020). Namun, sejumlah studi mutakhir menunjukkan bahwa di balik narasi fleksibilitas dan peluang tersebut, kerja

platform juga melahirkan bentuk baru ketidakpastian, subordinasi, dan kontrol kerja yang sulit dikenali secara kasat mata (Duffy et al., 2019; Woodcock, 2021).

Literatur terkini mengenai kapitalisme platform menegaskan peran sentral datafikasi dan algoritma dalam pengelolaan tenaga kerja. Aktivitas kerja direduksi menjadi data numerik yang terus-menerus dipantau, dievaluasi, dan dimonetisasi, sementara algoritma mengambil alih fungsi manajerial tradisional dalam mendistribusikan tugas dan menilai performa (Sadowski, 2019; Lee et al., 2015). Relasi kerja yang dihasilkan bersifat asimetris, meskipun dibingkai melalui bahasa kemitraan dan kewirausahaan individual (Rosenblat & Stark, 2016). Dalam praktik sehari-hari pengemudi Gojek dan Grab di Makassar, ketegangan ini terlihat dari klaim fleksibilitas yang berdampingan dengan pengalaman kerja yang semakin diatur oleh sistem aplikasi. Urgensi penelitian muncul dari kesenjangan antara klaim normatif platform mengenai kebebasan kerja dan temuan empiris yang menunjukkan intensifikasi kontrol kerja berbasis teknologi.

Ketegangan tersebut menjadi semakin problematis ketika ditinjau dari perspektif gender. Partisipasi perempuan sebagai pengemudi Gojek dan Grab di Makassar menunjukkan peningkatan, terutama karena pekerjaan ini dipersepsikan kompatibel dengan tanggung jawab domestik dan kebutuhan pengaturan waktu yang lentur. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam ekonomi platform kerap menghadapi kerentanan berlapis, mulai dari ketidakpastian pendapatan, bias dalam sistem penilaian pelanggan, hingga risiko keamanan di ruang publik (Gill & Scharff, 2011; van Doorn, 2017). Dalam konteks ini, muncul masalah penelitian utama mengenai bagaimana mekanisme manajemen algoritmik bekerja dalam mengatur, mengawasi, dan mendisiplinkan kerja perempuan pengemudi ojek daring, serta bagaimana mekanisme tersebut dialami secara spesifik oleh perempuan dalam keseharian kerja mereka di Kota Makassar.

Masalah tersebut tidak berhenti pada aspek teknis pengelolaan kerja. Pengalaman perempuan pengemudi Gojek dan Grab di Makassar memperlihatkan bahwa kontrol algoritmik beroperasi bersamaan dengan norma gender yang menuntut keramahan, kesabaran, dan pengelolaan emosi dalam interaksi layanan. Sistem rating pelanggan, misalnya,

tidak hanya menilai performa kerja secara teknis, tetapi juga menginternalisasi ekspektasi afektif yang kerap bersifat bias gender (Hochschild, 1983; Rosenblat & Stark, 2016). Di sisi lain, keputusan-keputusan yang diambil perempuan demi menjaga keamanan diri seperti membatalkan pesanan di lokasi tertentu atau membatasi jam kerja malam—sering kali dibaca sistem sebagai kegagalan performa. Kondisi ini memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai bagaimana pengalaman gender, keamanan, dan kerja emosional membentuk kerentanan sekaligus strategi bertahan perempuan pengemudi dalam ekonomi platform.

Lebih jauh, dinamika tersebut tidak dapat dilepaskan dari kerangka institusional yang lebih luas. Di Indonesia, status pengemudi ojek daring sebagai “mitra” masih dipertahankan dalam regulasi, sementara negara belum mengakui adanya hubungan kerja formal antara pengemudi dan perusahaan platform. Regulasi yang berlaku lebih banyak mengatur aspek operasional transportasi, tanpa menyentuh perlindungan ketenagakerjaan dan relasi kuasa dalam kerja digital. Dalam literatur ekonomi politik, kondisi ini dipahami sebagai bagian dari logika neoliberal yang memindahkan risiko dari korporasi dan negara ke individu pekerja (Peck & Theodore, 2007). Dalam konteks perempuan pengemudi Gojek dan Grab di Makassar, absennya perlindungan negara memperdalam ketergantungan mereka pada sistem aplikasi dan memperkuat posisi tawar platform.

Sejumlah studi sebelumnya telah mencoba merespons persoalan ini melalui analisis regulasi, studi perbandingan lintas negara, atau kritik normatif terhadap status kemitraan. Di beberapa konteks Global North, pengakuan hukum terhadap pengemudi sebagai pekerja ditunjukkan dapat membuka ruang perlindungan sosial yang lebih luas (Ravenelle, 2019). Namun, pendekatan tersebut cenderung bersifat makro dan kurang menangkap bagaimana relasi kuasa digital dijalani dalam pengalaman sehari-hari pekerja, khususnya perempuan. Studi lain menyoroti resistensi pekerja terhadap algoritma, tetapi lebih banyak berfokus pada aksi kolektif atau konflik industrial, bukan pada praktik bertahan yang bersifat mikro dan informal (Cant, 2019). Dalam konteks Indonesia, dan khususnya di Makassar, literatur yang menghubungkan secara langsung manajemen algoritmik, pengalaman gender, dan kerja emosional perempuan pengemudi masih relatif terbatas. Sebagian besar kajian lokal berfokus

pada aspek ekonomi atau kebijakan publik, sementara pengalaman hidup perempuan pengemudi sebagai subjek kerja digital belum digarap secara mendalam. Padahal, pendekatan feminisme pasca-strukturalisme menekankan bahwa relasi kuasa bekerja tidak hanya melalui institusi formal, tetapi juga melalui bahasa, teknologi, dan praktik sehari-hari yang membentuk subjektivitas pekerja (Foucault, 2008; Gill, 2017). Celah inilah yang belum sepenuhnya diisi oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pengalaman perempuan pengemudi Gojek dan Grab di Kota Makassar dalam menghadapi manajemen algoritmik dan status kemitraan. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengaitkan analisis kapitalisme platform dengan pendekatan feminisme pasca-strukturalisme yang menempatkan pengalaman perempuan sebagai pusat analisis. Secara hipotesis, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa bahasa kemitraan dan kontrol algoritmik bekerja sebagai aparatus ideologis yang menormalkan eksploitasi berbasis gender, sekaligus membentuk strategi bertahan yang cenderung individual dan terfragmentasi. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pengalaman kerja sehari-hari perempuan pengemudi transportasi daring di Makassar, dengan fokus pada relasi antara teknologi, gender, dan perlindungan kerja dalam konteks ekonomi platform perkotaan Indonesia.

Tinjauan Teori

Kapitalisme platform merupakan bentuk mutakhir dari reorganisasi kapitalisme yang mengandalkan infrastruktur digital, data, dan algoritma sebagai sarana utama akumulasi nilai. Dalam logika ini, platform seperti Gojek dan Grab memosisikan diri sebagai perantara netral yang mempertemukan penyedia jasa dan konsumen. Namun, klaim netralitas tersebut menutupi relasi kuasa yang timpang, karena platform tetap mengendalikan cara produksi, distribusi kerja, dan ekstraksi nilai tanpa harus memiliki alat produksi secara langsung. Risiko kerja dialihkan kepada pekerja sebagai pemilik aset—kendaraan, waktu, dan tenaga—sementara keuntungan terpusat pada perusahaan. Aktivitas sehari-hari yang sebelumnya berada di luar pasar kini direorganisasi menjadi sumber nilai ekonomi yang terus-menerus diekstraksi.

Pendukung ekonomi platform melihat model ini sebagai peluang inklusif yang memungkinkan individu menjadi wirausaha mikro (Sundararajan, 2016). Namun, pendekatan kapitalisme platform justru mempertanyakan siapa yang diuntungkan dari proses ini dan bagaimana nilai dihasilkan serta didistribusikan. Literatur tentang kapitalisme platform (Srnicek, 2016; Srnicek & Williams, 2016) menunjukkan bahwa platform bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan bentuk baru monopoli digital. Dua krisis besar, yakni krisis finansial 2008 dan pandemi Covid-19, tidak melemahkan kapitalisme, tetapi justru memperkuatnya melalui adaptasi berbasis teknologi dan dukungan negara (Harvey, 2010). Platform berkembang sebagai infrastruktur dominan yang mengandalkan efek jaringan, subsidi silang, dan keterlibatan pengguna secara konstan untuk mengekstraksi data.

Penelitian ini berangkat dari perspektif Foucauldian dengan memosisikan bahwa platform dapat dipahami sebagai rezim kekuasaan produktif yang tidak bekerja terutama melalui larangan atau paksaan langsung, melainkan melalui pengaturan kemungkinan tindakan. Kekuasaan tidak semata-mata represif, tetapi menghasilkan subjek, perilaku, dan norma kerja tertentu. Algoritma, dalam konteks ini, berfungsi sebagai teknologi pemerintahan (*governmentality*) yang mengatur populasi pekerja melalui statistik, metrik performa, dan evaluasi berkelanjutan. Data menjadi bahan baku utama kapitalisme abad ke-21, sementara kecerdasan buatan memungkinkan platform memprivatisasi pengetahuan tentang perilaku pekerja dan konsumen.

Manajemen algoritmik merupakan mekanisme kunci dari rezim ini. Sebagaimana dijelaskan Mateescu dan Nguyen (2019), manajemen algoritmik mengelola tenaga kerja dari jarak jauh melalui pengawasan berbasis data dan pengambilan keputusan otomatis. Algoritma bertindak sebagai manajer tak kasatmata yang menentukan penugasan kerja, harga, evaluasi performa, hingga sanksi. Dari perspektif Foucauldian, algoritma menyerupai bentuk panoptikon digital di mana pekerja tidak selalu diawasi secara langsung, tetapi bertindak seolah-olah selalu diawasi karena konsekuensi algoritmik dapat muncul kapan saja. Ketidaktransparanan algoritma menciptakan ketimpangan pengetahuan yang menempatkan pekerja dalam posisi tunduk.

Dalam platform transportasi, mekanisme ini membatasi otonomi pekerja untuk menentukan ritme kerja mereka sendiri. Fleksibilitas yang dijanjikan berubah menjadi fleksibilitas semu, karena algoritma mendorong pekerja untuk mengikuti pola kerja tertentu demi mempertahankan akses pada order. Di sinilah gamifikasi bekerja sebagai lapisan kekuasaan yang memperhalus kendali tersebut. Gamifikasi menggunakan sistem poin, peringkat, misi, dan bonus untuk meningkatkan keterlibatan (Zichermann & Cunningham, 2011). Dalam kerangka Foucauldian, gamifikasi dapat dipahami sebagai teknik normalisasi, yakni pekerja terdorong untuk menginternalisasi standar performa platform dan mendisiplinkan diri mereka sendiri. Penggabungan manajemen algoritmik dan gamifikasi menciptakan rezim kerja yang efektif karena kontrol tidak lagi tampak sebagai paksaan eksternal. Pekerja merasa terdorong secara sukarela untuk bekerja lebih lama dan lebih intens demi mengejar reward yang terus berubah. Namun, struktur permainan itu sendiri sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan platform. Dengan demikian, motivasi pekerja diarahkan dan diproduksi oleh desain sistem, bukan muncul secara otonom.

Dalam kerangka ini, kedudukan pekerja perempuan menjadi krusial. Kapitalisme platform tidak bersifat netral gender. Pekerja perempuan memasuki ekosistem platform dengan kondisi sosial yang sudah timpang: tanggung jawab domestik, norma gender, dan kerentanan ekonomi. Manajemen algoritmik memperkuat ketimpangan ini karena algoritma mengasumsikan ketersediaan waktu dan mobilitas yang sering kali lebih sulit dipenuhi oleh perempuan. Sistem rating dan penilaian pelanggan juga membuka ruang bagi bias gender, di mana performa perempuan dinilai tidak hanya berdasarkan kerja, tetapi juga ekspektasi sosial tentang keramahan, emosi, dan tubuh.

Dari perspektif Foucauldian, pekerja perempuan mengalami interseksionalitas rezim disiplin di mana mereka tidak hanya didisiplinkan sebagai pekerja, tetapi juga sebagai subjek gender. Gamifikasi mendorong mereka untuk terus menyesuaikan diri dengan standar performa yang maskulin, yakni kecepatan, ketahanan fisik, dan jam kerja panjang sembari tetap menghadapi tuntutan femininitas dalam interaksi dengan pelanggan. Dalam kondisi ini, fleksibilitas kerja justru memperluas beban kerja perempuan, karena batas antara kerja

produktif dan reproduktif semakin kabur. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menunjukkan bahwa kapitalisme platform bekerja melalui kombinasi monopoli digital, manajemen algoritmik, dan gamifikasi sebagai teknologi kekuasaan. Algoritma mengambil alih fungsi manajemen, sementara gamifikasi memastikan kepatuhan dan motivasi pekerja. Dalam rezim ini, pekerja perempuan menempati posisi yang paling rentan karena mengalami eksploitasi ekonomi sekaligus disiplin gender.

Metode Penelitian

Penelitian ini berangkat dari metodologi feminisme pasca-strukturalisme yang menempatkan feminisme tidak semata-mata sebagai kerangka berpikir, gerakan politik, atau preferensi ideologis, tetapi juga sebagai model penelitian. Dalam perspektif ini, feminisme digunakan untuk memahami pengalaman perempuan yang hidup dan bekerja di bawah struktur budaya patriarki serta konstruksi kuasa laki-laki yang melekat dalam masyarakat. Struktur tersebut kerap menghasilkan proses alienasi, marginalisasi, dan eksploitasi terhadap kehidupan perempuan. Sebagai landasan metodologis, penelitian ini mengadopsi pendekatan etnografi feminis. Pendekatan ini menekankan upaya untuk mendengarkan dan merefleksikan pengalaman hidup pengemudi perempuan secara langsung. Panduan etnografi beserta metode turunannya, seperti wawancara mendalam, digunakan untuk memahami pengalaman kerja yang kompleks, heterogen, dan interseksional secara lebih dekat. Subjek penelitian ditetapkan sebagai informan perempuan dengan kriteria utama berbasis gender. Penentuan kriteria lanjutan didasarkan pada pembacaan awal terhadap penelitian terdahulu mengenai prekariat pekerja gig dalam kapitalisme platform, dengan pembatasan pada sektor layanan transportasi. Jumlah partisipan bersifat kualitatif, sebanyak enam orang. Seluruh wawancara dilaksanakan dengan jaminan kerahasiaan penuh terhadap identitas informan yang ditandai menggunakan kode tertentu.

Prosedur wawancara disusun berdasarkan beberapa pertimbangan utama, yaitu membangun tingkat hubungan yang tinggi antara peneliti dan subjek penelitian, mengedepankan prinsip resiprokal, serta menerapkan perspektif feminisme dalam proses wawancara. Relasi yang dibangun bersifat setara dan non-hierarkis. Model wawancara yang

digunakan adalah wawancara mendalam tidak terstruktur dengan tujuan menggali pengalaman pengemudi perempuan dalam menghadapi kondisi kerja yang prekar. Proses ini juga mendorong refleksi bersama mengenai persoalan kerja yang dialami dalam konteks struktur patriarki.

Dalam pengumpulan data, pemahaman partisipan terhadap status sebagai “mitra” menjadi aspek awal yang ditelusuri. Partisipan diminta menjelaskan bagaimana mereka memaknai istilah tersebut, apakah dipahami sebagai bentuk kebebasan dan kebanggaan atau sebagai penolakan tanggung jawab ketenagakerjaan oleh perusahaan. Selain itu, digali pula apakah partisipan merasa setara dengan perusahaan dan bagaimana status “mitra” memengaruhi cara mereka menilai diri sebagai pekerja. Penelitian ini juga menelusuri pengalaman partisipan dalam menghadapi kontrol algoritmik dan tekanan sistem aplikasi. Partisipan menjelaskan cara aplikasi membagikan order, perasaan dikontrol atau diawasi, serta pengalaman suspend, pemblokiran sementara, atau penurunan performa tanpa penjelasan yang jelas. Pemahaman terhadap sistem rating, bintang, dan insentif juga digali, termasuk apakah sistem tersebut dirasakan adil atau justru menimbulkan tekanan dan stres.

Tabel 1. Sumber Responden

Inisial	Usia	Status Keluarga	Pendi dikan	Lama Bekerja di Platform	Domisili Kecamatan/Kelurahan	Alasan Bergabung di Platform
A1	25	Lajang	S1	3 Tahun	Biringkanaya / Sudiang	Membantu ekonomi keluarga (generasi “sandwich” yang harus menanggung biaya keperluan orang tua dan adiknya)
A2	28	Menikah, anak 2	S1	5 Tahun	Tallo / Pannampu	Membutuhkan fleksibilitas kerja
A3	26	Menikah, anak 2	S1	5 Tahun	Tamalate / Mannuruki	PHK
B1	27	Menikah	S1	5 Tahun	Tallo / Rappokalling	Terjerat utang
B2	29	Lajang	SMA	4 Tahun	Biringkanaya / Paccerakkang	PHK
B3	38	Kawin cerai, anak 1	SMA	2 Tahun	Manggala / Mangala	Membantu ekonomi keluarga

Aspek kondisi ekonomi dan strategi bertahan hidup turut menjadi fokus. Partisipan diminta menjelaskan rata-rata penghasilan, fluktuasi pendapatan, serta cara menanggung biaya operasional seperti bensin, perawatan, dan kuota internet. Strategi mempertahankan pendapatan, termasuk pemilihan jam kerja, lokasi, pinjaman online, dan peran komunitas, juga dibahas. Selanjutnya, pengalaman terkait gender dan keamanan kerja ditelusuri melalui cerita tentang diskriminasi, pelecehan, strategi menjaga keamanan diri, serta pandangan terhadap mekanisme perlindungan dan kemungkinan bias sistem. Relasi dengan sesama pengemudi dan komunitas, serta refleksi akhir partisipan mengenai posisi mereka sebagai “mitra” atau pekerja dan harapan terhadap masa depan kerja platform digital, menjadi penutup dari rangkaian wawancara penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Kelahiran Kapitalisme Platform

Fenomena ekonomi-gig yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dapat dikonseptualisasikan sebagai manifestasi dari kapitalisme platform. Bentuk kapitalisme ini pada dasarnya merupakan mutasi dari rezim kerja neoliberalisme yang relatif lebih moderat, karena beroperasi dengan mengandalkan revolusi internet sebagai fondasi utamanya. Kapitalisme platform bekerja melalui proses digitalisasi, datafikasi, serta finansialisasi dalam sistem produksi dan pertukaran nilai (Langley & Leyshon, 2017). Dalam konteks ini, platform digital seperti Gojek dan Grab di Indonesia tidak sekadar berfungsi sebagai perusahaan teknologi, melainkan sebagai infrastruktur pasar privat yang mengorganisasi interaksi sosial, mengatur mobilitas tenaga kerja, serta mendistribusikan sumber daya ekonomi. Dengan mengombinasikan logika neoliberal—seperti deregulasi, privatisasi, dan individualisasi—dengan kemampuan teknologi baru untuk mengelola data dan algoritma, kapitalisme platform memperluas bentuk penguasaan pasar hingga menembus infrastruktur kehidupan sehari-hari.

Proses platformisasi ekonomi juga mereproduksi gagasan-gagasan utama neoliberalisme, terutama terkait fleksibilitas kerja, subjektivitas kewirausahaan, dan penekanan pada tanggung jawab individu. Namun, reproduksi ini berlangsung dalam konteks digital yang jauh lebih intensif. Hubungan kerja diatur melalui sistem kontrak fleksibel berbasis

aplikasi, sementara pekerja dikonstruksikan sebagai “mitra independen” atau “wirausahawan mikro.” Dalam kerangka ini, kapitalisme platform tidak menghapus logika neoliberal, tetapi justru mengintegrasikannya ke dalam arsitektur digital yang memungkinkan kontrol, akumulasi, dan eksploitasi berlangsung dalam skala yang lebih luas sekaligus lebih tersembunyi (Duffy et al., 2019; Uysal, 2022). Dengan kata lain, teknologi digital tidak meniadakan relasi kuasa lama, melainkan memperhalus dan mengaburkan bentuk operasionalnya.

Salah satu elemen paling mendasar dari kapitalisme platform adalah datafikasi. Datafikasi merujuk pada proses mengubah tindakan, interaksi, dan hubungan sosial menjadi data numerik yang dapat disimpan, diproses, dan dimonetisasi (Sadowski, 2019). Melalui mekanisme ini, hampir setiap aktivitas sosial mulai dari perjalanan harian, pola konsumsi, komunikasi digital, hingga ekspresi diri dikonversi menjadi bahan baku ekonomi yang memiliki nilai tukar. Data berfungsi sebagai bentuk baru dari kapital tetap (*fixed capital*), sebagaimana dijelaskan oleh Fuchs (2024), karena ia terus menghasilkan nilai dalam jangka panjang. Perusahaan yang memiliki akses eksklusif terhadap data dalam jumlah besar memperoleh keunggulan yang bukan hanya bersifat ekonomis, tetapi juga politis. Dalam konteks ini, data tidak lagi sekadar informasi, melainkan sumber kekuasaan yang memungkinkan perusahaan menentukan distribusi perhatian, visibilitas, dan akses ekonomi.

Dalam logika neoliberalisme klasik, privatisasi dipandang sebagai mekanisme utama untuk menciptakan efisiensi dan inovasi. Dalam kapitalisme platform, privatisasi tersebut bergeser dan terjadi pada level infrastruktur informasi. Platform digital membangun ekosistem tertutup, di mana data dikumpulkan dari aktivitas pengguna, tetapi kepemilikan dan kontrol sepenuhnya berada di tangan korporasi. Kondisi ini melahirkan bentuk baru dari rentier capitalism berbasis data, di mana perusahaan seperti Google, Meta, dan Amazon memperoleh keuntungan bukan dari produksi barang secara langsung, melainkan dari penguasaan terhadap arsitektur informasi dan lalu lintas data (Sadowski, 2020). Secara empiris, perusahaan digital memonetisasi apa yang disebut sebagai “surplus perilaku” pengguna, yaitu data yang dihasilkan tanpa kompensasi langsung sebagai sumber nilai tambah

(Cinnamon, 2017). Fenomena ini kerap dipahami sebagai bentuk “accumulation by dispossession digital,” karena nilai ekonomi diekstraksi dari aktivitas sosial yang sebelumnya tidak dianggap sebagai komoditas. Dengan demikian, datafikasi memperluas prinsip akumulasi neoliberal ke wilayah kehidupan yang bersifat personal dan sosial, seperti perhatian, emosi, dan relasi antarindividu.

Jika data dapat dipahami sebagai bentuk baru dari kapital, maka algoritma merupakan bentuk baru dari kekuasaan yang mengelolanya. Dalam kapitalisme platform, algoritma tidak hanya menjalankan fungsi teknis, tetapi berperan sebagai instrumen pengaturan sosial atau *algorithmic governance*. Melalui sistem peringkat, rekomendasi, dan optimasi, algoritma menentukan siapa yang terlihat, siapa yang memperoleh pekerjaan, serta bagaimana nilai ekonomi didistribusikan (Flyverbom, 2022). Di ranah tenaga kerja, algoritma menggantikan peran manajer tradisional dalam mengatur ritme kerja, mendistribusikan tugas, mengevaluasi kinerja, hingga memutuskan akses pekerja terhadap sumber pendapatan. Dalam konteks ekonomi-gig, algoritma merepresentasikan rasionalitas neoliberal dalam bentuk digital, yakni mengatur tanpa tampak memerintah dan menegakkan disiplin tanpa kehadiran otoritas personal (Woodcock, 2021).

Lebih jauh, algoritma juga berfungsi sebagai perangkat ideologis. Ia menciptakan ilusi objektivitas dan efisiensi teknologis, padahal di baliknya tertanam logika ekonomi dan politik yang selektif. Sebagaimana dikemukakan oleh Power (2022), algoritma bekerja sebagai “mekanisme ekonomi dari ketidaktransparanan,” di mana kontrol dan eksklusi dilegitimasi sebagai keputusan teknis. Dalam hal ini, algoritma mewujudkan cita-cita neoliberal tentang rasionalitas pasar dalam bentuk yang ekstrem, yakni penilaian yang tampak netral tetapi justru mengukuhkan hierarki kapital. Kekuasaan algoritmik bersifat ganda: ia merupakan dispositif ekonomi sekaligus teknologi pemerintahan yang mengatur pasar, tenaga kerja, dan perilaku individu melalui insentif yang disamarkan sebagai efisiensi teknis.

Dalam perkembangannya, kapitalisme platform kerap dipromosikan melalui istilah “ekonomi berbagi (*sharing economy*).” Istilah ini tidak dimaksudkan untuk meredefinisikan kapitalisme platform yang sering dipandang sinis, melainkan berfungsi sebagai bahasa

pemasaran yang mempresentasikan dirinya sebagai revolusi sosial berbasis kebebasan, fleksibilitas, dan inovasi. Narasi ini mengklaim bahwa teknologi digital memungkinkan individu untuk berbagi sumber daya dan mengatur diri sendiri di luar batasan birokrasi negara maupun perusahaan konvensional. Namun, ekonomi berbagi sejatinya bukan tentang berbagi dalam pengertian sosial, melainkan tentang komodifikasi berbagi (Martin, 2016). Setiap praktik berbagi dikonversi menjadi transaksi ekonomi yang dimediasi oleh platform, di mana sebagian besar nilai diserap oleh pemilik infrastruktur digital.

Dalam konteks ini, ideologi berbagi berfungsi sebagai teknologi depolitisasi. Relasi kerja dibingkai sebagai kemitraan sukarela, bukan sebagai relasi kuasa yang timpang. Pekerja dikonstruksikan sebagai mitra usaha yang mengelola risiko sendiri, sementara kontrol algoritmik dan kepemilikan data tetap berada di tangan platform. Ideologi kemitraan menanamkan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam kesadaran pekerja, tetapi tanpa memberikan kendali nyata atas harga, algoritma, maupun data. Dengan demikian, ekonomi berbagi bukanlah antitesis kapitalisme, melainkan bentuk lanjutannya, di mana akumulasi berlangsung melalui kehidupan sosial dan personal manusia, sekaligus menunjukkan kesinambungan antara neoliberalisme dan kapitalisme platform dalam menjadikan rasionalitas pasar dan tanggung jawab individu sebagai fondasi moral tatanan sosial.

2. Status Kemitraan Sebagai Fitur Eksploitatif Bagi Perempuan

Transformasi ekonomi digital di Indonesia selama satu dekade terakhir tidak hanya mengubah cara kerja, tetapi juga membentuk cara baru masyarakat memahami nilai, produktivitas, dan hubungan sosial. Di kota Makassar, Gojek dan Grab hadir sebagai ikon yang menghubungkan mobilitas sehari-hari dengan infrastruktur teknologi yang semakin dominan dalam kehidupan urban. Melalui aplikasi telepon pintar, jutaan pengemudi terhubung dengan pelanggan secara real-time, membangun imajinasi tentang kerja yang fleksibel dan cair. Namun, dalam percakapan sehari-hari di warung kopi, posko ojek, atau sela waktu kerja, tampak bahwa retorika “peluang tanpa batas” sering kali berseberangan dengan pengalaman nyata para pengemudi. Istilah “mitra” yang tampak netral justru memuat kerangka ideologis yang menyamarkan relasi kuasa yang timpang.

Dalam diskursus publik, “mitra” dipahami sebagai relasi kerja sama yang setara, seolah-olah platform dan pengemudi memiliki posisi yang sama. Penghindaran istilah “pekerja” atau “karyawan” memungkinkan perusahaan melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap jaminan sosial, standar upah, dan perlindungan hukum ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, hubungan tersebut tidak pernah simetris. Platform mengendalikan tarif, akses kerja, sistem insentif, serta algoritma yang mendistribusikan pesanan dan sanksi (Rosenblat & Stark, 2016). Dengan demikian, istilah “mitra” tidak sekadar mendeskripsikan relasi, tetapi membentuk persepsi dan menyembunyikan ketimpangan yang telah terstruktur.

Ekonomi gig berkembang seiring penetrasi masif telepon pintar dan internet. Pada 2023, lebih dari tiga juta orang bekerja sebagai pengemudi daring (BPS, 2023). Bagi banyak perempuan kelas menengah bawah, platform ini dipandang sebagai jalan keluar dari keterbatasan akses kerja formal. Fleksibilitas dilihat sebagai kebebasan untuk mengatur waktu di antara kewajiban domestik dan kebutuhan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, fleksibilitas ini bersifat semu. Ketidakpastian pendapatan, minimnya perlindungan sosial, dan absennya jaminan kesehatan menjadi bagian dari kondisi kerja yang rapuh, tetapi dinormalisasi melalui bahasa kebebasan. Negara turut memperkuat ruang abu-abu ini. Regulasi seperti Permenhub No. 12/2019 dan No. 17/2023 mengatur kendaraan dan tarif, tetapi tidak menyentuh hubungan kerja. Kementerian Ketenagakerjaan belum mengklasifikasikan pengemudi sebagai pekerja formal. Dalam kondisi ini, logika neoliberalisme platform menemukan ruangnya, dengan negara menerima narasi efisiensi dan inovasi sambil mengaburkan perlindungan pekerja (Peck & Theodore, 2007).

Status “mitra” juga harus dipahami sebagai pembentukan subjek entrepreneur of the self. Risiko kecelakaan, kerusakan kendaraan, hingga penurunan performa algoritmik dibebankan pada individu, sementara perusahaan memanen data dan mengatur kerja melalui sistem yang tidak terlihat (Moisander et al., 2017). Program seperti Mitra Teladan atau Mitra Inspiratif merayakan ketangguhan individu, khususnya perempuan, tetapi menutupi struktur yang memaksa mereka terus bertahan. Sejalan dengan kritik feminisme neoliberal, perempuan dipuji tetapi tidak dibebaskan (Gill & Scharff, 2011).

Kontrol paling intensif bekerja melalui algorithmic management. Penilaian kinerja, distribusi pesanan, dan disiplin dijalankan melalui kalkulasi otomatis, bukan perintah langsung (Lee et al., 2015). Perempuan pengemudi kerap mengalami disiplin ganda yakni algoritmik dan gender yang diperhalus melalui bahasa moral seperti “mitra baik” atau “mitra unggul” (Duffy, 2017). Dalam konteks ini, negara tetap mempertahankan celah hukum dengan memposisikan startup sebagai simbol modernitas, sementara relasi kerja yang subordinatif terus berlangsung (Budiman, 2020).

Dalam upaya memahami bagaimana seluruh dinamika ini terasa dalam kehidupan sehari-hari, penelitian ini mewawancarai enam pengemudi perempuan, tiga bekerja melalui Gojek (A1-A3) dan tiga melalui Grab (B1-B3) yang menjalani keseharian mereka sebagai driver di Makassar.

Pengalaman para pengemudi perempuan dalam platform ojek daring memperlihatkan wajah lain dari apa yang disebut perusahaan sebagai “kemitraan”. Di balik istilah yang terdengar netral dan progresif itu, tersimpan relasi kerja yang dirasakan timpang, melelahkan, dan sering kali melukai martabat. **A1**, perempuan lulusan S1 berusia akhir 20-an, mengingat jelas alasan awalnya mendaftar. Ia berada dalam tekanan keluarga: orang tua yang menua dan adik yang masih kuliah membuatnya merasa tidak punya pilihan selain segera bekerja. Kata “mitra” dan “fleksibel” terdengar seperti janji yang menenangkan. Namun setelah tiga tahun, janji itu baginya terasa kosong. Ia menyebut dirinya seperti buruh yang digaji berdasarkan suasana hati aplikasi kadang ramai, sering kali dingin, tanpa penjelasan. Yang paling menyakitkan baginya adalah ketika kerja keras yang ia lakukan tidak bisa ia jelaskan secara jujur kepada keluarga, karena hasilnya sering tidak sebanding dengan pengorbanan waktu dan tenaga.

Kekecewaan yang sama muncul dalam cerita **A2**, seorang ibu dengan dua anak kecil. Pada awalnya, pekerjaan ini tampak seperti ruang napas bagi perempuan dengan tanggung jawab domestik. Mira percaya ia bisa menyesuaikan kerja dengan kebutuhan anak-anaknya. Namun setelah lima tahun, ia menyadari bahwa fleksibilitas itu lebih menyerupai ilusi yang rapuh. Setiap kali ia menolak order demi menjemput anak atau membatalkan perjalanan

karena anak demam, sistem menghukumnya dengan sepiunya order keesokan hari. Mira merasa hidupnya perlahan dikendalikan oleh aplikasi, bukan oleh kebutuhannya sebagai ibu. Kata “mitra” baginya hanyalah label yang menutupi kenyataan bahwa ia tidak pernah dilibatkan dalam keputusan penting, dari tarif hingga kebijakan keselamatan. Cerita **A3** bahkan berangkat dari situasi yang lebih terdesak. Setelah di-PHK dari pekerjaan administrasi, ia masuk ke dunia ojek daring sebagai solusi sementara. Namun waktu berjalan, dan “sementara” itu berubah menjadi lima tahun. Dewi menyadari bahwa sistem tidak memberi ruang bagi kerentanan manusia. Ketika ia mengurangi jam kerja karena harus mengurus anak, performanya turun. Ketika ia membatalkan order karena keadaan darurat, akun seolah dicap bermasalah. Dewi merasa bahwa statusnya sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai manusia, tidak pernah benar-benar diperhitungkan. Yang dihitung hanya angka dan performa.

Rasa getir semakin terasa dalam kisah **B1**, yang masuk ke platform karena jeratan utang. Ia mengaku sejak awal sebenarnya ragu, tetapi kebutuhan memaksanya percaya pada narasi kemitraan. Namun seiring waktu, ia merasa semakin terasing. Tarif turun tanpa dialog, insentif berubah sepihak, dan aturan semakin ketat. Nina menertawakan secara pahit klaim bahwa pengemudi bukan pekerja. Baginya, tidak ada istilah lain yang lebih jujur selain bekerja bahkan sering kali bekerja hingga belasan jam sehari—tanpa perlindungan dan tanpa suara. Pengalaman **B2**, mantan buruh pabrik yang di-PHK, mempertegas gambaran tersebut. Ia menyebut dirinya “buruh aplikasi”, karena meski tidak memiliki jam kerja resmi, sistem menuntutnya selalu siap. Berhenti sebentar untuk makan saja bisa membuat akun “dingin”. Tidak ada waktu istirahat yang benar-benar aman. Rosa merasa istilah mitra justru menyakitkan, karena menyamakan relasi kuasa yang sangat tidak setara. Sementara itu, **B3**, seorang ibu tunggal lulusan SMA, menyoroti dampak psikologis dari kerja berbasis aplikasi. Ia masuk ke platform dengan harapan sederhana: bertahan hidup dan membesarkan anak. Namun dua tahun kemudian, ia merasakan harga dirinya terkikis perlahan. Ada hari-hari ia bangga karena bisa membawa pulang uang. Namun jauh lebih banyak hari di mana ia merasa tidak berharga, selalu salah di mata sistem, dan tidak pernah cukup baik bagi algoritma yang mengatur hidupnya.

Wawancara dan pengamatan menunjukkan bahwa istilah “mitra” tidak hanya berfungsi sebagai kategori administratif, tetapi juga membentuk cara mereka memahami diri. Beberapa partisipan mengungkapkan kebanggaan sebagai “mitra”, sebab istilah itu memberi mereka rasa otonomi simbolik; mereka merasa bebas, walaupun setiap keputusan kerja sebenarnya ditentukan algoritma yang tidak mereka pahami. Di titik inilah paradoks neoliberalisme platform menjadi sangat nyata. Kebebasan yang dirayakan oleh aplikasi tidak pernah sepenuhnya nyata, melainkan bersifat ilusif. Para pengemudi bergerak dalam ruang di mana pilihan tampak tersedia, tetapi selalu dibingkai oleh sistem yang mengatur akses, peluang, dan nilai kerja mereka. Relasi ini tidak hanya bersifat ekonomi. Melainkan juga merupakan relasi ideologis, yang memadukan bahasa, teknologi, dan aturan kerja dalam satu rezim kontrol yang halus namun sangat kuat. Melalui interaksi sehari-hari, percakapan yang retak di tengah kemacetan, atau keluhan yang diungkapkan setengah berbisik saat menunggu order, terlihat bagaimana status “mitra” menjadi mekanisme yang melekat pada kesadaran para perempuan pengemudi ini yakni membentuk cara mereka menilai diri, menilai pekerjaan, dan menafsirkan kemungkinan hidup mereka dalam ekonomi digital yang terus berubah.

Dalam percakapan-percakapan yang berlangsung selama wawancara, tampak jelas bahwa sebagian besar partisipan menerima status “mitra” pada awalnya karena mereka mempercayai janji kebebasan kerja yang ditawarkan platform. Bagi mereka, menjadi mitra berarti bisa menentukan jam kerja sendiri, mengatur ritme sesuai kewajiban domestik, atau sekadar mengambil jeda ketika tubuh dan pikiran terasa lelah. Namun, seiring waktu, batas antara kebebasan dan tuntutan sistem mulai tampak kabur. Para perempuan ini menyadari bahwa kebebasan yang diklaim platform tidak lebih dari ilusi, sebab mereka tetap harus menyesuaikan diri dengan logika algoritmik yang menentukan kapan seseorang dianggap “efektif” bekerja. Ketika mereka memilih untuk tidak aktif di jam sibuk, penghasilan merosot drastis, dan aplikasi memberi sinyal bahwa keputusan itu adalah sebuah kesalahan.

Dalam situasi seperti ini, otonomi personal perlahan berubah menjadi ketergantungan sistemik. Sebagaimana dijelaskan van Doorn (2017), fleksibilitas yang dijanjikan platform bekerja sebagai sebuah *temporal fix* yakni mekanisme yang memaksa pekerja mengikuti

tempo algoritma ketimbang ritme kehidupan pribadi mereka. Bagi para perempuan pengemudi, *temporal fix* ini memunculkan dilema ganda: mereka harus memadukan tuntutan domestik dengan jadwal algoritmik yang mengharuskan kehadiran konstan jika ingin mencapai insentif. Mereka bergerak di antara ruang-ruang yang saling tarik: dapur yang menuntut kehadiran di pagi hari, sekolah anak yang harus dijemput siang, dan aplikasi yang menyatakan bahwa penghasilan paling optimal justru berada pada jam-jam yang sering kali beririsan dengan kewajiban rumah tangga.

Kebanggaan simbolik yang ditawarkan istilah “mitra” bekerja kuat pada awalnya. Banyak partisipan merasa menjadi bagian dari era baru: mereka bukan buruh pabrik, bukan pekerja ritel yang terikat shift, melainkan “wirausaha digital” yang mengelola diri. Tetapi kebanggaan itu mengikis perlahan ketika pengalaman harian memperlihatkan betapa sempit ruang kendali mereka terhadap pekerjaan. **A2**, salah satu partisipan, menggambarkan paradoks ini dengan lugas: “Kami dibilang bebas, tapi kalau telat sedikit saja karena urusan anak, sistem bisa langsung turunkan performa. Besoknya order sepi sekali.” Pengalaman seperti ini memperlihatkan bagaimana konsep kebebasan dalam ekonomi platform bekerja layaknya perangkat halus. Dalam kerangka neoliberalisme platform, *freedom as control* menjadi cara baru mendisiplinkan pekerja di mana mereka menyalahkan diri sendiri ketika pendapatan menurun, bukannya menyoal mekanisme sistem yang tidak pernah transparan (Gill, 2017).

Salah satu pola naratif yang paling sering muncul dalam wawancara ialah perasaan bahwa mereka “diawasi tanpa mengetahui siapa yang mengawasi”. Tidak ada figur manajer yang memberi perintah langsung, tetapi sistem menentukan hampir semua hal: pesanan masuk, performa, penalti, dan bahkan kesempatan untuk mendapatkan bonus. Sebagaimana diuraikan Rosenblat dan Stark (2016), bentuk manajemen semacam ini menciptakan *shadow management* yakni sebuah otoritas tak kasat mata yang mengatur pekerja secara menyeluruh tanpa harus hadir sebagai individu yang dapat ditanyai atau digugat. Para pengemudi mencoba menebak logika sistem dengan memahami pola pesanan, waktu login, atau lokasi-lokasi yang “disukai” algoritma. Mereka menjadi penafsir rutin dari sinyal-sinyal yang dikeluarkan aplikasi,

membangun strategi bertahan hidup dengan cara berpindah titik mangkal, mengikuti forum daring, atau mengatur waktu aktif berdasarkan saran sesama pengemudi.

Bagi perempuan, tekanan ini terasa lebih berat. Mobilitas mereka dibatasi bukan hanya oleh algoritma, tetapi juga oleh kekhawatiran akan keselamatan. Mereka menghindari lokasi-lokasi gelap, permukiman sempit, atau pesanan yang masuk pada malam hari. **A3** menceritakan bahwa ia kerap membatalkan order yang mengarah ke daerah atau lorong yang gelap: *“Kalau tempatnya gelap atau jauh masuk-masuk lorong, saya cancel. Saya takut sekali. Tapi begitu saya cancel, performa saya langsung turun. Besok-besoknya order jadi lebih sepi.”* Dalam ketegangan ini terlihat bahwa algoritma tidak pernah netral. Keputusan yang mereka ambil demi keselamatan diri justru dibaca sebagai kegagalan performatif yang merugikan pendapatan. Selain kontrol teknis, para partisipan juga menghadapi bentuk subordinasi emosional melalui tuntutan untuk selalu ramah dan menyenangkan pelanggan. Melalui sistem rating bintang, platform mendorong mereka mengelola emosi demi menjaga akun tetap aman. Sebagaimana dikemukakan Hochschild (2012), kerja emosional seperti ini menjadi bagian integral dari relasi pelayanan. Salah satu partisipan menggambarkan tekanan ini melalui komentar sederhana tetapi kuat: jika mereka “marah sedikit”, pelanggan dapat memberi rating rendah dan ancaman suspend pun muncul. Para perempuan ini tidak hanya menyumbangkan waktu dan tenaga, tetapi juga senyum, kesopanan, dan kesabaran yang terus-menerus diuji.

Dalam kerangka Foucault (2008), mekanisme ini merupakan bentuk *governmentality*. Platform memproduksi gambaran “mitra ideal”: tangguh, sabar, tidak mengeluh, dan bijak mengatur waktu. Nilai-nilai ini menggantikan tanggung jawab struktural dengan tanggung jawab moral individu. Kesulitan ekonomi bukan dipandang sebagai hasil dari ketidakadilan sistemik, tetapi sebagai tanda bahwa seseorang belum cukup disiplin atau cerdas mengatur ritme kerja. Dalam konteks gender, subordinasi ini semakin dalam. Banyak partisipan perempuan yang menceritakan pengalaman mengalami pelecehan verbal, stereotip bahwa perempuan mengemudi lebih lambat, atau komentar merendahkan dari pelanggan laki-laki. Norma sosial pun membatasi ruang kerja mereka bahwa bekerja malam dianggap tidak pantas,

sementara aplikasi tidak memperhitungkan risiko yang dihadapi perempuan di jam-jam tertentu.

B2 menggambarkan beberapa interaksi yang membuatnya merasa rentan di mana ada pelanggan yang menggoda, ada yang sengaja duduk terlalu dekat, dan ada pula yang memberikan komentar bernada seksual. Ketika ia melaporkan kejadian-kejadian ini melalui fitur bantuan, respons yang muncul hanyalah pesan otomatis yang tidak memberikan penyelesaian. Ia menyimpulkan bahwa keselamatan perempuan “tidak pernah jadi prioritas”. Dalam kondisi ini, narasi pemberdayaan perempuan yang dipromosikan perusahaan tampak bertentangan dengan pengalaman mereka sendiri. Gojek dan Grab memasarkan citra “perempuan tangguh di jalan”, tetapi tidak menyediakan perlindungan spesifik berbasis gender, sehingga perempuan harus membangun mekanisme keamanan sendiri yang sering kali bertentangan dengan logika algoritma.

Meski demikian, dalam celah-celah tekanan ini, bentuk solidaritas informal antar pengemudi perempuan mulai tampak. Mereka membentuk grup WhatsApp, komunitas spontan di titik mangkal, atau sekadar saling memberi tanda ketika ada situasi mencurigakan. **A2** menggambarkan bagaimana ia merasa lebih kuat ketika bertemu pengemudi perempuan lain di malam hari. Mereka tidak saling meminta, tetapi secara intuitif saling mendekat ketika ada risiko, seakan keselamatan dapat dibangun dari kehadiran sesama perempuan. Solidaritas ini, meski tidak terorganisir secara politis, menjadi bentuk resistensi kecil terhadap tuntunan individualistik platform. Di sinilah terlihat bagaimana eksploitasi tidak hanya menciptakan beban, tetapi juga membangun ruang pertemuan yang memungkinkan tumbuhnya kesadaran kritis. Namun, seperti dicatat Cant (2019), resistensi dalam ekonomi platform cenderung episodik dan terfragmentasi karena struktur kerjanya yang individualistik. Istilah “mitra” memperkuat kondisi ini dengan menempatkan pekerja sebagai unit-unit ekonomi yang berdiri sendiri, bukan bagian dari kolektivitas yang memiliki kepentingan bersama. Hubungan industrial didepolitisasi, diganti oleh bahasa kewirausahaan yang memecah kemungkinan solidaritas struktural.

Dari seluruh temuan lapangan dan literatur, terlihat bahwa status “mitra” berfungsi sebagai aparatus ideologis neoliberal yang mengaburkan relasi produksi kapitalis. Ia mengubah pekerja menjadi pengusaha semu, memindahkan tanggung jawab struktural kepada individu, dan menormalkan eksploitasi sebagai konsekuensi dari pilihan personal. Melalui bahasa “kemitraan”, perusahaan dapat menghindari kewajiban hukum, sementara negara memperoleh legitimasi sebagai pendukung inovasi teknologi tanpa harus memperluas jaminan sosial. Dengan demikian, “kemitraan” bukan hanya istilah administratif, tetapi sebuah kompromi politik yang menguntungkan kapital dan negara, sembari meninggalkan para pengemudi perempuan dalam posisi yang terus-menerus diguncang oleh ketidakpastian, risiko, dan absennya perlindungan yang layak.

3. Algoritma Sebagai Penoptikon Digital

Pengemudi diobjektivikasi oleh platform Gojek dan Grab sebagai “mitra,” bukan pekerja. Relasi ini diperkenalkan melalui bahasa yang akrab dalam logika neoliberalisme, yakni fleksibilitas, kemandirian, dan kebebasan memilih. Namun, ketika mengikuti keseharian perempuan pengemudi di kota-kota Indonesia, gambaran tersebut segera retak. Retorika kemitraan tidak sepenuhnya menutupi lapisan kontrol yang bekerja melalui mekanisme digital yang senyap tetapi menetap. Di balik slogan kebebasan, terdapat arsitektur pengawasan yang terus memantau, mencatat, dan menilai tanpa pernah menyatakan dirinya sebagai atasan. Para pengemudi perempuan hidup di antara janji kebebasan dan sensasi dikendalikan yang sulit dijelaskan, seolah aplikasi hadir sebagai entitas tanpa nama tetapi memiliki kehendak.

Dalam percakapan dengan para pengemudi perempuan, aplikasi sering digambarkan layaknya makhluk hidup, bukan sekadar perangkat teknis. Aplikasi disebut “mengetahui,” “melihat,” “mengingat,” bahkan “menghukum.” Teknologi, dalam pengalaman mereka, tidak lagi netral, melainkan agen yang menentukan batas-batas tindakan. Relasi kerja ini tidak hanya berlangsung antara manusia dan mesin, tetapi menyentuh lapisan afektif dan psikologis pengalaman kerja perempuan, sehingga pengawasan dirasakan lebih berlapis.

A1, pengemudi Gojek, menggambarkan bagaimana aplikasi mengatur ritme hidupnya: *“Aplikasi seperti tahu setiap saya berhenti. Kadang cuma mau minum sebentar, sudah muncul*

peringatan. Saya jadi serba salah... rasanya selalu diawasi.” Pengalaman diawasi ini tidak datang dari perintah langsung, melainkan dari sistem yang menekan ruang jeda. **B2**, pengemudi Grab, mengungkapkan beban serupa: “Belum apa-apa sudah dinilai... Sistemnya dingin, tapi efeknya panas di kepala.” Pernyataan ini mencerminkan kontradiksi sistem rating yang diklaim objektif, tetapi hadir sebagai sumber kecemasan. Kesan “selalu diawasi” muncul berulang. Ruang kerja berubah menjadi ruang panoptik digital, di mana GPS, log waktu, dan rating menciptakan pengawasan berbasis ketidakpastian. Pengemudi menyesuaikan diri seolah selalu diawasi, menjadikan kontrol algoritmik nyaris total, tak terlihat, tetapi sangat nyata.

Pada tahap awal penelitian, penulis meminta seluruh partisipan menggambarkan bagaimana mereka pertama kali menyadari keberadaan pengawasan digital. Tanggapan mereka penulis rangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2. Kesadaran akan Pengawasan Digital

Tema	Kutipan Wawancara	Interpretasi
Kesadaran dipantau	“Semua gerak saya terbaca. Aplikasi tahu saya berhenti lima menit, tahu saya tolak order dua kali. Kadang saya takut buka sendiri.” (A1)	AI telah menginternalisasi logika pengawasan; disiplin bekerja sebelum sanksi muncul
Cemas terhadap penilaian	“Setiap selesai antar, saya langsung cek rating. Padahal kadang belum apa-apa. Rasanya deg-degan.” (B1)	Rating menjadi sumber kecemasan harian yang membentuk ritme emosional kerja
Menebak pola algoritma	“Saya belajar pola aplikasi, tapi pola itu sering berubah. Jadi seperti main catur sama mesin tapi kita selalu di langkah kalah.” (A2)	Upaya memahami sistem adalah bentuk resistensi mikro, tetapi selalu dalam kondisi timpang
Bias gender	“Kalau saya anter dikit, dibilang kurang sigap. Laki-laki kok beda ya? Mereka lebih gampang dapat lima bintang.” (B2)	Sistem rating memperkuat bias gender yang dilegitimasi oleh algoritma
Privasi	“Kadang saya merasa tidak punya ruang. Bahkan kalau saya pulang cepat pun, sistem tetap memantau jam saya aktif.” (A3)	Pengawasan masuk ke ruang privat dan waktu non-produktif
“Bos digital”	“Bos saya itu HP. Kalau HP bilang sepi, saya harus cari tempat ramai. Kalau HP bilang turun performa, saya harus pikir apa lagi mau istirahat.” (B3)	Aplikasi dipersonifikasikan sebagai otoritas; tanda internalisasi kekuasaan algoritmik

Tabel di atas adalah pintu masuk penting untuk memahami bagaimana perempuan pengemudi mulai merasakan diri mereka bukan sekadar bagian dari sistem kerja, tetapi berada dalam apa yang mereka sebut sebagai “dunia aplikasi.” Dunia itu memiliki hukum-hukumnya

sendiri, ritmenya sendiri, dan moralitasnya sendiri. Bagi mereka, bekerja berarti terus bernegosiasi dengan logika algoritmik yang tidak pernah selesai terbaca.

Pengawasan digital, bagi para perempuan ini, tidak hanya hadir dalam bentuk teknis. Ia memiliki dimensi emosional yang kuat. Salah satu saluran afektif paling signifikan adalah sistem rating. Perusahaan menggambarkannya sebagai mekanisme penilaian yang demokratis di mana pelanggan menilai kualitas layanan pengemudi. Namun bagi perempuan pengemudi, rating lebih mirip ruang sosial yang tidak stabil dan penuh bias gender.

A2 adalah salah satu pengemudi yang paling jujur mengenai tekanan itu. Ia berkata, *“Kadang penumpang laki-laki bilang saya terlalu diam. Tapi kalau saya terlalu ramah, nanti dikira menggoda. Saya tidak punya posisi aman.”* Kalimat ini bukan hanya keluhan, tetapi etnografi mini tentang ketidakmenentuan posisi perempuan di ruang publik. Perempuan tidak hanya dinilai karena kecekatan mengemudi atau ketepatan waktu, tetapi juga karena performativitas feminitas yang dipaksa untuk berada di tengah: tidak terlalu dingin, tidak terlalu ramah. Lebih lanjut, peneliti mewawancarai seluruh partisipan untuk memahami bagaimana mereka memosisikan sistem rating.

Tabel 3. Sistem Rating dan Afeksi

Tema	Kutipan	Analisis
Rating sebagai tekanan emosional	“Saya sudah usahakan terbaik, tapi kalau bintang turun rasanya jadi gagal sebagai pekerja... bahkan sebagai ibu.” (A2)	Rating bukan hanya angka, tetapi moral evaluation yang mengikat kerja dan identitas perempuan
Disiplin diri	“Saya hindari debat sama pelanggan walau mereka salah. Rating itu lebih penting daripada rasa kesal.” (B2)	Pekerja melakukan self-policing karena ketergantungan pada rating
Bias pelanggan laki-laki	“Pernah ada yang godain saya. Saya diam. Dia kasih bintang empat, tulis komentar ‘kurang ramah’.” (A3)	Rating menjadi saluran reproduksi bias gender sekaligus risiko kekerasan simbolik
Pelanggan perempuan lebih kritis	“Pelanggan perempuan sering komentar hal-hal kecil. Tapi saya tidak bisa marah. Mereka bilang ‘ibu-ibu harusnya lebih teliti’.” (B3)	Perempuan menghadapi bias ganda dinilai oleh sesama perempuan dan laki-laki secara berbeda

Ketika mendengarkan cerita-cerita seperti ini, penulis menyadari bahwa pengawasan algoritmik bekerja melalui dua arah: melalui mesin dan melalui manusia. Pelanggan adalah agen yang memperkuat pengawasan tersebut, baik secara sadar maupun tidak. Ketika bias

gender diterjemahkan menjadi angka, ia masuk ke dalam sistem sebagai nilai objektif, seolah tidak lagi bermasalah. Di sinilah kekuasaan algoritma bekerja: ia menetralkan ketidakadilan dengan menjadikannya metrik.

GPS kemudian muncul sebagai bentuk pengawasan lain yang tidak kalah kuat. Banyak perempuan pengemudi menggambarkan GPS sebagai “mata” yang tidak pernah tidur. B3 menyebutnya “mata dingin,” dan **A2** menyebutnya “*tangan besar yang memegang punggung saya.*” Metafora-metafora ini bukan sekadar cara puitis untuk menggambarkan teknologi, tetapi ekspresi sensorik tentang bagaimana pengawasan meresap ke tubuh.

Tabel 4. GPS dan Disiplin Ruang

Tema	Kutipan	Analisis
GPS sebagai kontrol	“Saya tidak bisa ambil jalan yang saya anggap aman. Aplikasi bilang ini jalan tercepat. Kalau saya lewat jalan aman, nilai saya turun.” (A2)	Algoritma memaksa perempuan mengikuti rute yang tidak selalu aman
Ruang publik tidak ramah	“Kalau malam saya hindari daerah tertentu, tapi nanti aplikasi bilang saya tidak aktif jam ramai.” (B1)	Keamanan menjadi variabel yang tidak dipertimbangkan algoritma
Mobilitas terbatas	“Kadang saya parkir di lokasi ramai, tapi aplikasi tidak kasih order. Saya pikir mungkin karena saya perempuan sendiri di situ.” (A3)	Sistem memfasilitasi ketidakpastian berbasis gender dalam pengawasan
Ketidakpastian arah	“Saya sering merasa aplikasi menguji saya. Tiba-tiba order jauh, lalu dekat, lalu jauh lagi.” (B3)	Pengawasan memunculkan rasa ‘diuji’, bukan hanya diarahkan

Namun barangkali bentuk kontrol paling melelahkan bagi perempuan pengemudi adalah kontrol atas waktu. Pengawasan waktu hadir melalui metrik yang tampak sepele: jam aktif, kecepatan respons, dan bonus yang hanya muncul pada jam-jam tertentu. Mekanisme ini membuat waktu hidup mereka terfragmentasi dan dikendalikan oleh aplikasi.

Tabel 5. Waktu sebagai Instrumen Disiplin

Tema	Kutipan	Analisis
Waktu dikendalikan sistem	“Kalau jam ramai saya tidak keluar, rasanya bersalah. Kayak saya membiarkan uang hilang.” (A1)	Disiplin waktu diinternalisasi sebagai moral ekonomi obligation
Konflik domestik	“Saya harus pilih: antar anak dulu atau kejar bonus pagi. Dua-duanya penting.” (B2)	Algoritma menciptakan konflik temporal khas perempuan
Tubuh dipaksa ikut ritme	“Kadang badan capek, tapi target tinggal sedikit. Aplikasi seperti bisik-bisik: ‘ayo terus’.” (B3)	Contoh gamifikasi sebagai bisikan disiplin afektif

Meskipun begitu, perempuan pengemudi tidak hanya menjadi objek dari sistem pengawasan. Percakapan penulis dengan mereka menunjukkan adanya strategi cerdas yang mereka sebut sebagai “akal-akal,” “cara main,” atau “jalan pintas.” Mereka menciptakan pengetahuan kolektif untuk melawan ketidakpastian algoritma. Grup WhatsApp khusus perempuan menjadi ruang aman untuk mengobrol, bertukar tips, dan mengurangi beban emosional.

Tabel 6. Resistensi Mikro Pengemudi Perempuan

Tema	Kutipan	Analisis
Analisis pola algoritma	“Kami bagi info jam mana yang benar-benar ramai, bukan yang aplikasi bilang ramai.” (A1)	Perempuan membangun pengetahuan tandingan pada algoritma.
Solidaritas emosional	“Kalau ada yang drop karena rating, kami telepon. Kami bilang ini bukan salah dia.” (B3)	Bentuk perawatan sosial sebagai perlawanan terhadap disiplin emosional sistem.
Menghindari pelanggan berisiko	“Kalau ada yang sering kasih rating rendah, kami saling ingatkan.” (A2)	Pengetahuan kolektif sebagai strategi bertahan hidup.
Ruang aman komunitas	“Di grup, kami bebas cerita. Di luar, kami harus jaga citra di depan pelanggan.” (B3)	Komunitas menjadi ruang untuk menurunkan performativitas yang dipaksa rating.

Tetapi bahkan ketika mereka melawan, banyak dari mereka tetap menunjukkan tanda-tanda internalisasi disiplin algoritmik. **B3** menyebut, “*Kalau rating turun, itu salah saya. Berarti saya kurang cepat.*” Internalitas ini adalah wujud paling kuat dari panoptikon digital: para pengemudi mengawasi diri mereka sendiri. Mereka hidup dalam dialektika antara perlawanan dan penerimaan, antara agensi dan keterbatasan.

Tabel 7. Normalisasi Disiplin Algoritmik

Tema	Kutipan	Analisis
Menyalahkan diri	“Kalau performa turun, saya malu. Saya anggap ada yang salah cara saya.” (A3)	Algoritma menciptakan internalized guilt.
Menganggap sistem objektif	“Aplikasi tidak mungkin salah. Berarti saya yang harus perbaiki.” (B5)	Naturalisasi otoritas algoritmik.
Ketergantungan pada metrik	“Saya baru tenang kalau lihat bintang saya aman.” (A2)	Pengawasan menjadi kebutuhan afektif.

Dari seluruh rangkaian wawancara, muncul gambaran yang jelas bahwa panoptikon digital tidak bekerja hanya melalui mesin, tetapi melalui tubuh, emosi, moralitas, bahkan

identitas perempuan. Algoritma menciptakan rasa bersalah, kecemasan, dan performativitas tertentu, tetapi juga memunculkan celah-celah tempat perempuan merawat satu sama lain, membagi tips, dan membangun ruang aman di tengah tekanan sistem.

Perempuan pengemudi yang penulis temui bukan subjek pasif dari kekuasaan digital. Mereka adalah aktor yang terus menegosiasikan relasi kuasa ini, mencari cara untuk bertahan hidup dalam ekonomi digital yang semakin tidak pasti. Mereka memahami aplikasi bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai struktur yang membatasi dan memberi peluang sekaligus. Dalam ketidakpastian tersebut, mereka membangun strategi kreatif untuk mempertahankan martabat dan identitas mereka sebagai perempuan, pekerja, dan individu yang memiliki kehidupan di luar dunia algoritma.

Pada akhirnya, panoptikon digital tidak pernah sepenuhnya berhasil membungkam agensi mereka. Ia hanya menjadi medan baru tempat perempuan memperlihatkan kekuatan, kecermatan, dan ketahanan. Di sanalah etnografi ini menemukan maknanya: pada cerita-cerita kecil yang memperlihatkan bagaimana para perempuan ini menyusun ulang dunia digital yang mengawasi mereka, untuk menciptakan ruang hidup yang masih mereka miliki, meskipun selalu berada dalam bayang-bayang sistem yang tidak pernah tidur.

Dalam proses mengikuti ritme algoritma ini, para partisipan sebenarnya membangun serangkaian taktik kecil, sering tidak terlihat, tetapi penting bagi keseharian mereka sebagai resistensinya atas panoptikon algoritmik. Mereka bukan sekadar mengikuti alur sistem, tetapi menegosiasikan ruang otonomi dari balik layar ponsel yang terus menyala. Pengalaman sepuluh partisipan perempuan memperlihatkan bahwa kerja platform bukan hanya persoalan mengantarkan penumpang atau barang, tetapi juga mengelola relasi dengan mesin, dengan pelanggan, dan dengan ritme keluarga. Kutipan-kutipan berikut telah disamarkan dan diringkas, tetapi tetap mempertahankan makna inti sebagaimana disampaikan oleh para partisipan.

Dalam narasi para pengemudi perempuan, “otonomi” muncul bukan sebagai kebebasan penuh, melainkan sebagai serangkaian taktik untuk mengatur diri di bawah sistem yang selalu mengawasi. Mereka tahu bahwa algoritma membaca pola kerja mereka, tetapi

mereka pun belajar membaca pola algoritma. Relasi timbal balik ini tidak setara—mesin tetap memegang kuasa—tetapi dinamika kecil di dalamnya membuka ruang bagi negosiasi.

Tabel 8. Negosiasi Teknis terhadap Algoritma

Tema	Kutipan Partisipan	Analisis
Mengelola aplikasi	“Kalau saya lihat orderan mulai aneh—misalnya jarak jauh tapi tarif kecil. Saya off sebentar. Buka ulang sistemnya.” (A1)	Strategi teknis untuk mengurangi tekanan kecil dan mengambil kembali kendali.
Menghindari jam tidak menguntungkan	“Sistem itu kayak maunya sendiri. Kalau jam sepi tetap paksa kita ambil order jauh. Saya biasanya matikan aplikasi pindah tempat dulu, baru nyalakan lagi.” (B2)	Off-on repositioning sebagai taktik yang dipelajari secara kolektif.
Mengakali penalti	“Kadang saya nolak order bukan karena malas, tapi karena takut masuk daerah rawan. Tapi kalau kebanyakan nolak, performa turun. Jadi saya tunggu detik terakhir, baru cancel pelan-pelan supaya nggak dianggap menolak.” (A3)	Resistensi berbasis performa yang berusaha menegosiasikan keamanan tubuh vs tuntutan sistem.

A1 menggambarkan bagaimana ia mengembangkan kemampuan membaca suasana sistem: *“Saya bisa rasa kalau aplikasi lagi ‘ngambek’. Kalau tiba-tiba sepi, biasanya bukan karena tidak ada penumpang, tapi karena sistem lagi hitung ulang performa. Kadang saya tinggal beli air di warung, terus tiba-tiba order masuk lagi. Seperti sistem lihat saya ‘taat’... padahal saya cuma istirahat.”* Pengalaman ini memperlihatkan bagaimana pengawasan digital mengalami proses internalisasi dan berubah menjadi intuisi. Sebuah jeda untuk minum air yang sebenarnya merupakan sesuatu yang lazim dan seharusnya bebas dari makna menjadi bagian dari strategi agar tetap selaras dengan logika sistem. Dalam konteks inilah, negosiasi peran domestik dan kerja berkelindan dengan teknologi. Para perempuan tidak bekerja dalam ruang kosong, melainkan juga mereka bekerja dari dalam ritme keluarga yang selalu bergerak.

Tabel 9. Negosiasi Peran Domestik dan Kerja

Tema	Kutipan Partisipan	Analisis
Ritme rumah tangga	“Saya mulai narik setelah anak sekolah. Kadang jam ramai saya malah di rumah karena anak pulang. Jadi saya nggak bisa ikut pola aplikasi.” (A1)	Pekerjaan platform harus disesuaikan dengan ritme reproduktif, yakni membentuk produktivitas yang situasional.
Ruang domestik sebagai batas	“Kalau anak sakit, ya saya berhenti. Walau performa turun, nggak ada pilihan.” (B3)	Ketegangan antara logika algoritmik dan kewajiban perawatan.

Keseimbangan sebagai strategi	“Saya nggak bisa kejar target tinggi, tapi saya atur ritme. Saya kerja secukupnya, bukan sesuai keinginan aplikasi.” (A1)	Otonomi muncul dari pengaturan ritme sendiri, bukan produktivitas maksimal.
--------------------------------------	---	---

Dalam percakapan dengan para perempuan, tampak bahwa pekerjaan platform tidak pernah berdiri sendiri dari ritme rumah tangga. **A2** menggambarkan irisan itu dengan sangat jelas: *“Aplikasi bilang jam ramai jam 7–9 pagi. Tapi itu jam saya siapkan anak sekolah. Jadi saya selalu ketinggalan poin. Mau bagaimana, keluarga tetap prioritas. Sistem nggak peduli itu.”* Di sini terlihat bahwa fleksibilitas platform merupakan fleksibilitas bersyarat. Jam kerja boleh dipilih, tetapi pilihan itu diberi nilai, dihitung, dan berdampak langsung pada pendapatan.

Waktu dalam platform menjadi komoditas, sementara waktu dalam keluarga adalah kewajiban moral dan emosional. Para perempuan hidup dalam dua logika waktu sekaligus, menggabungkan keduanya dalam cara yang rumit, kadang menyakitkan, tetapi juga penuh kreativitas. Dalam aspek afeksi, logika kontrol algoritma bekerja melalui sistem rating yang digerakkan pelanggan.

Tabel 10. Negosiasi Afektif dalam Sistem Rating

Tema	Kutipan Partisipan	Analisis
Tekanan keramahan	“Pernah saya capek banget, jadi nggak banyak ngomong. Penumpang kayaknya tersinggung, kasih bintang empat. Habis itu saya terpaksa pasang ‘senyum kerja’.” (B3)	Kerja emosional menjadi tuntutan eksplisit rating.
Ekspresi diri	“Kadang penumpang laki-laki mulai tanya yang aneh-aneh. Mau marah tapi takut rating jelek. Jadi saya alihkan pembicaraan, padahal tidak nyaman.” (A3)	Rating memperkuat relasi kuasa dan membatasi ekspresi afektif.
Emosi sebagai komoditas	“Saya harus jaga suasana ceria. Itu bukan karakter saya, tapi karakter yang disukai aplikasi.” (A3)	Subjektivitas dibentuk melalui metrik performa emosional.

Dalam cerita-cerita mereka, terlihat bahwa kerja emosional menjadi elemen penting yang dibentuk oleh sistem. **B1** menceritakan pengalaman dilecehkan secara verbal, tetapi memilih untuk tetap tenang demi menghindari penalti: *“Penumpang laki-laki itu kadang suka goda. Kalau kita marah, mereka bisa balas lewat bintang. Sistem nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadinya kita yang harus tahan diri.”* Di sini dapat diamati bahwa bentuk

kekuasaan lain menunjukkan pelanggan sebagai perpanjangan mata sistem, mengawasi tidak hanya performa teknis tetapi juga emosi. Dalam tekanan semacam ini, solidaritas digital antar-perempuan menjadi salah satu sumber kekuatan.

Solidaritas ini membentuk *literacy*, bukan *literacy* formal seperti dalam pelatihan, tetapi pengetahuan yang lahir dari pengalaman bersama. Mereka belajar bukan dari aplikasi, tetapi dari percakapan mengenai apa yang terasa ganjil, apa yang tampak berulang, dan apa yang berubah. Di sini, perempuan membentuk semacam komunitas pengetahuan yang hidup, tempat mereka menguji dugaan, berbagi strategi, dan membangun cara bertahan dari tekanan sistem. Selain itu, strategi spasial dan keamanan tubuh menjadi aspek yang sangat penting dalam negosiasi kerja.

Tabel 11. Solidaritas Digital dan Literasi Algoritmik

Tema	Kutipan Partisipan	Analisis
Komunitas perempuan	“Di grup WA driver perempuan, kami saling cerita kalau ada promo atau titik rawan. Kadang cuma saling menyemangati.” (A3)	Solidaritas sebagai sumber literasi digital dan ketahanan emosional.
Pengetahuan kolektif	“Kami sering diskusi pola aplikasi. Misalnya pola order naik kalau cuaca mendung, atau kalau banyak driver libur Jumat.” (A2)	Pengetahuan algoritmik dibangun dari pengalaman, bukan transparansi perusahaan.
Humor sebagai resistensi	“Kalau aplikasi ngaco, kami kirim meme saja. Biar nggak stres. Kadang ketawa lebih ampuh dari marah.” (B1)	Humor sebagai bentuk perlawanan afektif terhadap ketidakpastian.

Keputusan **A3** untuk meminta penumpang pindah titik menunjukkan improvisasi yang dibangun oleh kebutuhan untuk tetap aman sambil memenuhi tuntutan algoritma. Sistem hanya melihat jarak dan rute optimal, tetapi tubuh perempuan membawa pengalaman lain—pengalaman memahami mana ruang kota yang ramah, mana yang menyimpan ancaman. Dengan berbicara kepada mereka, terlihat jelas bahwa kota tidak pernah menjadi ruang netral; ia memiliki medan gender yang mengharuskan perempuan berhati-hati bahkan dalam keputusan kecil. Sementara itu, dalam aspek resistensi mikro, para perempuan juga mengembangkan sejumlah taktik yang mungkin tampak sederhana, tetapi memiliki makna politis yang halus.

Tabel 12. Strategi Spasial dan Keamanan Tubuh

Tema	Kutipan Partisipan	Analisis
Memilih wilayah aman	“Saya tahu daerah yang gelap atau sepi. Meski aplikasinya bilang ‘zona ramai’, saya tetap tidak masuk. Keselamatan nomor satu.” (B1)	Otonomi diwujudkan melalui keputusan spasial; tubuh menjadi pertimbangan utama.
Waktu kerja	“Saya hanya kerja sampai sore. Malam saya tidak berani. Jadi pendapatan memang lebih kecil, tapi saya lebih tenang.” (A1)	Perempuan membatasi ruang dan waktu untuk meminimalkan risiko.
Konflik antara produktivitas dan keamanan	“Kalau nolak order dari daerah rawan, performa turun. Jadi saya kadang ambil dulu sebentar, lalu segera minta penumpang pindah titik. Itu taktik saya.” (A3)	Negosiasi keamanan melalui improvisasi teknis dalam sistem algoritmik.

Negosiasi otonomi dalam pengawasan algoritmik bukan tentang tindakan besar atau pemberontakan yang eksplisit. Ia hadir sebagai pilihan-pilihan harian yang tampaknya kecil, yakni mematikan aplikasi sejenak, memilih untuk tidak mengejar level, atau sekadar menertawakan ketidakpastian sistem. Dalam tindakan-tindakan kecil itulah perempuan memulihkan rasa kendali terhadap hidup mereka. Mereka menjadikan jeda sebagai ruang untuk bernapas, bukan sebagai tanda kemalasan, dan menafsirkan ulang aplikasi sebagai alat, bukan sebagai penguasa.

Dalam keseluruhan narasi, terlihat bahwa pengawasan algoritmik bekerja sebagai kekuasaan yang tidak hanya teknis, tetapi juga afektif. Pengawasan ini membentuk cara perempuan merasakan diri mereka sendiri, menilai performa mereka, dan memikirkan bagaimana tubuh mereka bergerak di kota. Sistem tidak pernah sepenuhnya diam, ia hadir dalam notifikasi, dalam angka rating, dalam hubungan antara waktu dan bonus, dan dalam rasa selalu harus responsif. Namun kekuasaan itu tidak pernah total. Ia selalu menyisakan celah kecil yang dimanfaatkan oleh perempuan untuk bernegosiasi, memaknai ulang, dan sesekali melawan.

Otonomi dalam konteks ini tidak dapat dipahami sebagai kebebasan yang mutlak. Ia adalah ruang yang dinegosiasikan, dirawat, dan diperjuangkan setiap hari. Para perempuan yang bekerja sebagai pengemudi platform menjadi ahli dalam menciptakan otonomi yang tidak spektakuler tetapi sangat signifikan secara emosional dan politis. Mereka bergerak dalam dunia yang dikendalikan algoritma sambil tetap menyimpan ruang untuk diri mereka sendiri

yakni sebuah ruang untuk menghentikan aplikasi, ruang untuk memilih pelanggan, ruang untuk merasa lelah, ruang untuk tertawa bersama teman-teman komunitas mereka, dan ruang untuk mendahulukan keselamatan mereka sendiri.

Dalam pengalaman mereka, penulis melihat gambaran tentang bagaimana kerja digital membentuk bentuk-bentuk subjektivitas baru, tetapi juga bagaimana perempuan terus menemukan cara untuk mempertahankan martabat dan kehendak mereka di dalam sistem yang serba menghitung. Mereka memperlihatkan bahwa otonomi bukanlah absennya pengawasan, tetapi kemampuan untuk tetap menjadi subjek di dalam pengawasan itu. Di tengah dunia digital yang semakin terukur, perempuan pengemudi ini menunjukkan bahwa negosiasi otonomi adalah praktik sehari-hari yang rumit, cerdas, dan terus bergerak sehingga tampak menjadi sebuah bentuk resistensi halus yang terus melekat dalam kehidupan mereka.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerja transportasi daring perempuan di Makassar berlangsung dalam rezim kapitalisme platform yang ditandai oleh manajemen algoritmik, bahasa kemitraan, dan absennya perlindungan kerja formal. Temuan utama menegaskan bahwa algoritma berfungsi sebagai panoptikon digital yang mengatur distribusi kerja, pendapatan, dan disiplin melalui rating, insentif, serta ancaman *suspend* yang tidak transparan. Bagi pengemudi perempuan, kontrol ini berlapis karena beririsan dengan norma gender, kerja emosional, dan risiko keamanan di ruang publik. Fleksibilitas yang dijanjikan platform terbukti bersifat semu di mana keputusan yang diambil demi keluarga atau keselamatan justru dibaca sistem sebagai kegagalan performa. Meski demikian, perempuan tidak sepenuhnya pasif melainkan mereka mengembangkan strategi bertahan mikro melalui solidaritas informal, literasi algoritmik, dan negosiasi waktu serta ruang kerja.

Daftar Pustaka

- BPS. (2023). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2023*.
- Brenner, N., Peck, J., & Theodore, N. (2010). After neoliberalization? *Globalizations*, 7(3), 327–345. <https://doi.org/10.1080/14747731003669669>
- Budiman, A. (2020). Startup digital, ekonomi platform, dan transformasi ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2), 157–174.

- Cant, C. (2019). *Riding for Deliveroo: Resistance in the new economy*. Polity Press.
- Cinnamon, J. (2017). Social injustice in surveillance capitalism. *Surveillance & Society*, 15(5), 609-625. <https://doi.org/10.24908/ss.v15i5.6433>
- Duffy, B. E. (2015). *Gendering the labor of social media production*. *Feminist Media Studies*, 15(4), 710–714. <https://doi.org/10.1080/14680777.2015.1053715>
- Duffy, B. E., Poell, T., & Nieborg, D. B. (2019). Platform practices in the cultural industries: Creativity, labor, and citizenship. *Social Media + Society*, 5(4), 1–8. <https://doi.org/10.1177/2056305119879672>
- Flyverbom, M. (2022). Overlit: digital architectures of visibility. *Organization Theory*, 3(3). <https://doi.org/10.1177/26317877221090314>
- Foucault, M. (2008). *The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978–1979*. Palgrave Macmillan.
- Fuchs, C. (2024). Appropriation of digital machines and appropriation of fixed capital as the real appropriation of social being: a comment on toni negri's article "the appropriation of fixed capital: a metaphor?". *Triplec Communication Capitalism & Critique Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society*, 22(1), 468-475. <https://doi.org/10.31269/triplec.v22i1.1512>
- Gill, R. (2017). *Gender and the media* (2nd ed.). Polity Press.
- Gill, R., & Scharff, C. (Eds.). (2011). *New femininities: Postfeminism, neoliberalism and subjectivity*. Palgrave Macmillan.
- Harvey, D. (2010). The right to the city: From capital surplus to accumulation by dispossession. Dalam S. Banerjee-Guha (Ed.), *Accumulation by dispossession* (pp. 17–32). SAGE.
- Hochschild, A. R. (1983). *The managed heart: Commercialization of human feeling*. University of California Press.
- Hochschild, A. R. (2012). *The managed heart: Commercialization of human feeling*. University of California Press. <https://doi.org/10.1525/9780520951853>
- Langley, P., & Leyshon, A. (2017). Platform capitalism: The intermediation and capitalisation of digital economic circulation. *Finance and Society*, 3(1), 11–31. <https://doi.org/10.2218/finsoc.v3i1.1936>
- Lee, M. K., Kusbit, D., Metsky, E., & Dabbish, L. (2015). Working with machines: The impact of algorithmic management on worker experience. In *Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1603–1612). ACM. <https://doi.org/10.1145/2702123.2702548>

- Mateescu, A., & Nguyen, A. (2019). *Explainer: Algorithmic management in the workplace*. Data & Society Research Institute. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3376436>
- Moisander, J., Groß, C., & Eräranta, K. (2017). Mechanisms of biopower and neoliberal governmentality in precarious work: mobilizing the dependent self-employed as independent business owners. *Human Relations*, 71(3), 375-398. <https://doi.org/10.1177/0018726717718918>
- Peck, J., & Theodore, N. (2007). Variegated capitalism. *Progress in Human Geography*, 31(6), 731-772. <https://doi.org/10.1177/0309132507083505>
- Power, M. (2022). Theorizing the economy of traces: from audit society to surveillance capitalism. *Organization Theory*, 3(3). <https://doi.org/10.1177/26317877211052296>
- Ravenelle, A. J. (2019). *Hustle and gig: Struggling and surviving in the sharing economy*. University of California Press.
- Rosenblat, A., & Stark, L. (2016). Algorithmic labor and information asymmetries: A case study of Uber's drivers. *International Journal of Communication*, 10, 3758-3784. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2686227>
- Sadowski, J. (2019). When data is capital: Datafication, accumulation, and extraction. *Big Data & Society*, 6(1), 1-12. <https://doi.org/10.1177/2053951718820549>
- Sadowski, J. (2020). The internet of landlords: digital platforms and new mechanisms of rentier capitalism. *Antipode*, 52(2), 562-580. <https://doi.org/10.1111/anti.12595>
- Srnicek, N. (2016). *Platform capitalism*. Polity Press.
- Srnicek, N., & Williams, A. (2016). *Inventing the future: Postcapitalism and a world without work* (Revised ed.). Verso Books.
- Sundararajan, A. (2016). *The sharing economy: The end of employment and the rise of crowd-based capitalism*. MIT Press.
- Uysal, G. (2022). Gender, digital labor, and the myth of flexibility: Women's experiences in platform work. *Gender, Work & Organization*, 29(5), 1451-1471. <https://doi.org/10.1111/gwao.12814>
- van Doorn, N. (2017). Platform labor: On the gendered and racialized exploitation of low-income service work in the "on-demand" economy. *Information, Communication & Society*, 20(6), 898-914. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1294194>
- Woodcock, J. (2020). The algorithmic panopticon at Deliveroo: Measurement, precarity, and
- Woodcock, J. (2021). The limits of algorithmic management. *South Atlantic Quarterly*, 120(4), 703-713. <https://doi.org/10.1215/00382876-9443266>

Zichermann, G., & Cunningham, C. (2011). *Gamification by design*. O'Reilly Media.